

Jejaring Kebijakan Dalam Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Terpadu

Ifah¹, Suryadi², Hermawan³

¹ Magister Adm.Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

² Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

³ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Abstrak

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dengan argumentasi demi percepatan pembangunan, menyebabkan terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Degradasi lingkungan dan lahan menjadi salah satu penyebab dari timbulnya bencana alam yang berkaitan dengan air (*water related disasters*) seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. *Water related disasters* ini diduga salah satu penyebabnya adalah rendahnya daya dukung DAS. DAS Brantas adalah DAS yang vital dalam menyangga ekosistem dan keberlangsungan tersedianya air bagi penduduk Jawa Timur, selain itu DAS Brantas adalah DAS prioritas yang harus segera mendapat penanganan menurut ketentuan pemerintah. Pengelolaan DAS Brantas adalah pengelolaan yang multi pihak dengan berbagai kepentingan sehingga harus dilakukan secara terpadu. Untuk bisa melakukan pengelolaan yang baik dibutuhkan perencanaan yang baik. Oleh karenanya penting untuk mengetahui jejaring kebijakan yang terjadi dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas, sehingga bisa teridentifikasi kemungkinan terjadinya refraksi tujuan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif- kualitatif dilakukan dengan metode wawancara, kuisisioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu terjadi dominasi satu instansi pemerintah- sehingga bisa diidentifikasi jejaring kebijakan yang terbentuk bertipe Bureaucratic network- dengan integrasi dan kohesivitas antar aktor yang rendah.

Kata kunci: *jejaring kebijakan, policy network, perencanaan, pengelolaan DAS Brantas terpadu*

Abstract

Natural resources exploitation and exploration to accelerate development cause environmental damages. Environmental and land degradation leads to low watershed support capabilities and contributes to water-related disasters such as flood, landslides, and draught. Brantas watershed is vital in supporting ecosystem and water availability to people in East Java. Brantas watershed is also a priority in treatment according to government regulations. Brantas watershed management is a multiparty management system, thereby containing many interests and needing integrated approach. To be able to perform proper management takes good planning. It is therefore important to know the policy networks that occur in the Brantas river basin management plans, so that there can be the possibility of objective refraction. This study is a descriptive-qualitative research conducted by interview, questionnaire and study documentation. The results showed that the integrated Brantas river basin management planning there is dominance of the government-that can be identified policy networks that are formed by network-type Bureaucratic integration and cohesion between actors is low.

Keywords: *Brantas's integrated watershed management policy network, planning,*

PENDAHULUAN

Konsep Pembangunan adalah satu diantara konsep-konsep yang paling mendesak di zaman sekarang ini (Bryant dan White, 1987). Ginanjar Kartasasmita dalam Riyadi dan

Bratakusumah (2004) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sehingga pembangunan harus dilaksanakan disegala aspek kehidupan manusia termasuk bidang kehutanan.

Dalam konteks sisi pembangunan lingkungan, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim dan bencana alam yang kerap

* Alamat korespondensi:

Ifah

Email : ifah-sip@yahoo.com

Alamat : BPDAS Brantas, Jl. Bandara Juanda, Surabaya, 61253

terjadi yang terkait dengan air (*water related disasters*) seperti banjir dan tanah longsor, salah satu penyebabnya adalah rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). (Kodoatie, 2009; Mulyana, et al, 2009)

Kerusakan DAS dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumber daya alam sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik kepentingan dan kurang keterpaduan antar sektor, antar wilayah hulu-tengah-hilir, terutama pada era otonomi daerah dimana sumber daya alam ditempatkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) berpotensi mengancam kelestarian sumber daya hutan dan lahan (Purwanto dan Paimin, 2007)

DAS Brantas memiliki peran sangat vital dalam menyangga kehidupan masyarakat di Jawa Timur. Namun kondisi DAS Brantas mengalami berbagai permasalahan, seperti daerah tangkapan hujan di bagian hulu DAS Brantas yang semakin memburuk akibat dari perambahan hutan dan pemanfaatan lahan yang tidak mengindahkan kaidah konservasi, menurunnya debit atau bahkan hilangnya banyak mata air di DAS Brantas, degradasi dasar sungai dan penurunan kualitas air (Dinas Kehutanan Prop.Jatim, 2010). Sebanyak 16 kota/kabupaten selama ini memanfaatkan air Sungai Brantas sebagai bahan baku air minum sebanyak 14,4 m³ per detik pada tahun 2005 dan akan meningkat menjadi 24,1 m³ per detik pada tahun 2020 (Arisandi, 2009). Apabila tidak ada perbaikan pengelolaan Sungai Brantas, pada tahun 2020 Jatim akan mengalami defisit air karena suplai Sungai Brantas yang mencapai 39,62 m³ per detik tidak akan bisa memenuhi kebutuhan air pada tahun 2020 yang mencapai 43,12 m³ per detik (Arisandi, 2009).

UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air, mengamanatkan agar pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh (mencakup semua bidang pengelolaan mulai dari konservasi sampai pemantauan dan evaluasi) dan terpadu (melibatkan semua pemilik kepentingan, antar sektor dan wilayah). Sedangkan pembagian wewenang tercakup dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Meskipun secara normatif pembagian wewenang telah jelas namun pada prakteknya ada kepentingan dan wewenang yang beririsan. Kelemahan lain yang ditemukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan aliran sungai, yaitu pengelolaan yang

bertumpu pada wilayah administrative (Raharja, 2008). Subadi dalam Raharja (2008) menyebutkan bahwa pendekatan pengelolaan tersebut berbenturan dengan pendekatan hidrologis, yang melingkupi lebih dari satu wilayah administratif. Dalam kondisi demikian koordinasi merupakan suatu keharusan (Riyadi dan Bratakusumah, 2004)

Pengelolaan DAS yang melintasi beberapa wilayah administrasi yang berbeda memerlukan koordinasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan dari hulu-hilir, sehingga kebijakan yang dilaksanakan tidak bersifat ego sektoral dan ego wilayah masing-masing (Dinas Kehutanan Prop.Jatim, 2010). Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja bukan hal yang mudah, tetapi dengan komitmen bersama dan kesadaran bersama bahwa dalam pengelolaan DAS berlaku prinsip "*one river, one plan, one management*" mengindikasikan pentingnya DAS dikelola sebagai suatu kesatuan utuh ekosistem sumberdaya alam (Enderwati, 2012).

Untuk menyelenggarakan pengelolaan DAS terpadu dari hulu ke hilir secara utuh diperlukan perencanaan yang komprehensif, yang mengakomodasikan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Maksud dari perencanaan ini adalah untuk menghindari perencanaan yang saling bertabrakan atau mungkin overlapping satu sama lain.

Adanya partisipasi stakeholders atau aktor-aktor dalam proses perumusan rencana atau perencanaan telah mendorong terbentuknya jejaring kebijakan (*policy network*). Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, dan masyarakat termasuk privat. (Warden, 1992)

Jejaring kebijakan pada tahap perumusan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan (Sawitri, 2008). Oleh karenanya penelitian tentang jejaring dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu penting untuk dilakukan dengan harapan akan menjadi masukan dalam tahap implementasi pengelolaan DAS terpadu juga evaluasi rencana, seperti apa yang dikemukakan oleh Howlett yaitu bahwa *policy network*:

" Practically, it has provided a model of the structure and operation of policy processes which governments and other

policy actors can use to better design and affect outcomes” (Howlett, 2002)

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang membahas pengelolaan DAS dari aspek Organisasi dilakukan oleh Raharja (2008). Hasil penelitian ini adalah model pengelolaan DAS yang berjalan masih bersifat independen dan sektoral, relasi antar organisasi juga belum terstruktur dengan baik, serta stakeholder yang cenderung berposisi pada sudut pandang atau kepentingannya sendiri-sendiri.

Kenabatho dan Montshiwa (2006) dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ada beberapa indikasi bahwa badan pengelola air ingin bergerak menuju ke arah pengelolaan sumber daya air terpadu, perlu adanya perubahan pragmatis terhadap cara sumber daya air dikelola dan digunakan pergeseran lengkap dari sektoral menjadi manajemen terpadu, dari atas ke bawah menjadi partisipasi stakeholder, dan pendekatan demand responsive, dari komando dan kontrol ke bentuk yang lebih kooperatif dan distributif, dari *closed expert-driven and self-monitoring management* menjadi lebih terbuka, transparan dan komunikatif, semua ditujukan untuk manajemen sumber daya air yang efektif. pengelolaan sumber daya air yang terpadu menjadi jalan yang harus ditempuh dengan manajemen yang terbuka dan melibatkan stakeholders. Hal ini harus dilakukan untuk mendapatkan kemanfaatan secara sosial ekonomi secara maksimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya dalam jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Annica Sandstorm dan Lars Carlsson, (2008) dengan metode studi kasus comparative, memberikan hasil bahwa : 1) Suatu kebijakan jejaring yang efektif dan inovatif terdiri atas kumpulan aktor yang heterogen yang terintegrasi secara central dan padat; 2) Pada saat level heterogenitas jejaring terhubung secara positif pada fungsi dari mobilisasi sumberdaya dalam proses pembuatan kebijakan, level integrasi yang tersentral mendorong fungsi pemprioritasan; 3) Penemuan ini dipercaya berkontribusi pada pemahaman atas pembuatan kebijakan dalam masyarakat sekarang. Sehingga penelitian ini mengindikasikan bahwa kekuasaan yang jelas penting ada dalam konsep jejaring kebijakan dan bahwa SNA (Analisis jejaring Sosial) adalah suatu cara untuk memperluas kemungkinannya.

Penelitian lain dilakukan oleh Mylopoulos, et al (2007), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penggunaan Hidrodiplomasi lintas negara sangat penting, yang akan mendorong manajemen pengelolaan sumberdaya air yang disebut sebagai mekanisme kooperatif. Suatu metodologi baru yang mengajukan partisipasi harus diterapkan dalam sektor manajemen air agar menghasilkan penyelesaian konflik dan pembangunan konsensus. Kecenderungan politik dan partisipasi publik dapat mengubah keberadaan sumberdaya air yang dipakai bersama dari isu permasalahan pada motivasi yang kuat terhadap kerjasama lintas negara

Sri Suwitri (2008) menemukan terbentuknya *policy networks* yang bertipe *pluralistic* dalam tim subsistem sedang aktor yang lain berbentuk *bureaucratic network*, kuatnya konflik antar kelompok menyebabkan terjadinya refraksi tujuan, dalam penelitiannya tentang jejaring kebijakan dalam perumusan kebijakan publik.

Rumusan penelitian adalah “ Bagaimana jejaring kebijakan (*policy network*) yang terbentuk dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007?”. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan hubungan dan interaksi antar aktor dalam proses penyusunan rencana pengelolaan DAS Brantas terpadu hingga diketahui jejaring kebijakan yang terbentuk.

Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu

Menurut Dixon dan Easter (1986), pengelolaan DAS didefinisikan sebagai proses formulasi dan implementasi dari suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut sumber daya alam dan manusia dalam suatu DAS dengan memperhitungkan kondisi sosial, politik, ekonomi dan faktor-faktor institusi yang ada di DAS dan di sekitarnya untuk mencapai tujuan sosial yang spesifik. Pengelolaan DAS bukan hanya hubungan antar biofisik, tetapi juga merupakan pertalian dengan faktor ekonomi dan kelembagaan. Dengan demikian perencanaan pengelolaan DAS perlu mengintegrasikan faktor-faktor biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan untuk mencapai kelestarian berbagai macam penggunaan lahan di dalam DAS yang secara teknis aman dan tepat, secara lingkungan sehat, secara ekonomi layak, dan secara sosial dapat diterima masyarakat (Brooks, et al., 1990).

Rencana pengelolaan DAS terpadu merupakan rencana multipihak yang disusun dengan pendekatan partisipatif, maka rencana ini akan memuat berbagai kepentingan dan tujuan serta sasaran yang harus diselesaikan melalui pendekatan multidisiplin, yang diintegrasikan dalam satu sistem perencanaan (Dinas Kehutanan Prop. Jatim, 2010).

Jejaring Kebijakan (Policy Network)

Policy network atau jejaring kebijakan dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, dideskripsikan sebagai aktor-aktor. Kedua, *linkages* atau hubungan antara aktor-aktor. Ketiga, *boundary* (Carlsson:2000).

Jejaring kebijakan tumbuh dengan bermacam jenis tergantung pada intensitas hubungan antar aktor dan dominasi salah satunya. Jenis jejaring kebijakan yang bisa muncul adalah 1) *Bureaucratic Network*; 2) *Clientelistic Network*; 3) *Triadic Network*; 4) *Pluralistic Network*. Apabila masyarakat mendominasi hubungan maka akan terbentuk empat jenis jejaring, yaitu 1) *Participatory Statis Network*; 2) *Captured Network*; 3) *Corporatist Network*; 4) *Issue Network* (Howlett and Ramesh, 1995).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe Deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, kuisisioner, observasi dan studi dokumen. Informan dipilih melalui teknik snowball sampling sedang analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dengan informan dari BPDAS Brantas, Balai Besar KSDA Jatim, Dinas Kehutanan Prop.Jatim, Dinas ESDM Prop.Jatim, Forum DAS, Dinas Pengairan Prop.Jatim, Perguruan Tinggi dan Perhutani. Yang menjadi informan adalah mereka yang pernah terlibat dan/ atau mengetahui proses penyusunan rencana pengelolaan DAS Brantas terpadu. Dalam penelitian ini data yang dicari adalah proses pelaksanaan perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu, aktor atau stakeholder yang terlibat, bentuk dan intensitas keterlibatan aktor, hubungan antar aktor dan konflik kepentingan yang terjadi dalam hubungan antar aktor tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Perencanaan Pengelolaan DAS Brantas Terpadu

Kerusakan lingkungan di Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya bencana alam yang terkait dengan air (*water related disaster*), seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan diduga sebagai akibat dari rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS-DAS di Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu.

Oleh karena itu diperlukan pengelolaan DAS secara terpadu yang harus melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam suatu DAS.

Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu sebagai pengganti Permenhut Nomor P.26/Menhut-II/2006 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumberdaya yang menyangkut berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak pihak, tidak semata-mata oleh pelaksana langsung di lapangan tetapi oleh pihak-pihak yang berperan dari tahapan perencanaan, implementasi, sampai dengan monitoring dan evaluasinya.

Rencana Pengelolaan DAS Brantas terpadu merupakan rencana jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang dijabarkan menjadi rencana jangka menengah 5 (lima) tahun bersifat semi detail pada tingkat sektor di setiap DAS. Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Brantas Terpadu secara umum bermaksud sebagai suatu proses partisipatif dalam penyusunan tujuan pengelolaan DAS Brantas, sebagai pendekatan perencanaan terpadu dan sebagai alat dalam menciptakan keharmonisan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya DAS Brantas. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai meliputi :

1. Diperolehnya suatu rencana yang menyeluruh antar pemerintah kabupaten/kota, antar sektor yang mencakup perumusan masalah, sasaran dan tujuan pengelolaan DAS Brantas.
2. Terbentuknya arahan program dan kegiatan dalam pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi sumberdaya alam di DAS Brantas berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi dan sasaran yang hendak dicapai dalam pencapaian tujuan pengelolaan, termasuk arahan (apa, siapa, kapan) pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelolaan DAS.
3. Tersusunnya ukuran/indikator kinerja pengelolaan yang disepakati bersama.
4. Tersusunnya mekanisme (apa, siapa, bentuk) sistem monitoring dan evaluasi yang disepakati diantara pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya DAS, yaitu:
 - a) Mewujudkan kondisi tata air DAS yang optimal meliputi kuantitas, kualitas dan distribusi menurut ruang dan waktu.
 - b) Mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan.
 - c) Mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak dalam pengelolaan DAS yang lebih baik.
 - d) Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Perencanaan pengelolaan DAS Brantas Terpadu di Jawa Timur secara legal formal dikuatkan dengan terbitnya SK Gubernur Nomor 188/325/KPTS/013/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Terpadu Provinsi Jawa Timur. Penyusunan rencana pengelolaan DAS Brantas terpadu dilakukan oleh UPT Kementerian seperti BPDAS Brantas, BBWS Kali Brantas, BBTNBTS, BBKSDA Jatim dan BPN, SKPD Propinsi seperti Bappeda, Dishut, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, BLH dan Dinas ESDM, BUMN seperti Perum Perhutani dan Jasa Tirta I serta melibatkan Forum DAS yang berfungsi sebagai wadah sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Brantas Terpadu telah selesai disusun pada akhir tahun 2010, namun secara legal formal belum diakomodir baik dalam SK Gubernur, Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah. Dokumen RPDAS Brantas Terpadu ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk pengesahan. Hal ini mengandung kekurangan dalam hal kekuatan untuk mengikat seluruh stakeholder yang terkait untuk wajib melaksanakan perencanaan yang dibuat bersama tersebut. Dari hasil wawancara juga terkuak bahwa mayoritas aktor atau stakeholder yang terlibat dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS Brantas terpadu ini merasa tidak wajib dan tidak berkewajiban untuk mengimplementasikan perencanaan tersebut.

Jejaring Kebijakan dalam Perencanaan Pengelolaan DAS Brantas Terpadu

Policy network atau jejaring kebijakan dideskripsikan sebagai aktor-aktor. dan, *linkages* atau hubungan antara aktor-aktor serta *boundaries* yang membatasi jejaring. Dalam penelitian ini teridentifikasi bahwa aktor-aktor yang terlibat adalah dari unsur pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN serta lembaga informal seperti Forum DAS.

Aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu didominasi oleh aktor dari kategori *Co Deliverer dan Professional stakeholder organisation*. Sementara *local stakeholder organisations dan members of public* tidak terlibat dan dilibatkan secara aktif (Orr, et al, 2007)

Hubungan antar aktor digunakan untuk melihat dominasi aktor sehingga dapat diketahui

bentuk jejaringnya. Untuk melihat hubungan antar aktor selama proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Brantas Terpadu (RPDASBT), dilakukan analisis hasil wawancara dan deskripsi pengolahan data kuisisioner.

Intensitas komunikasi dilakukan oleh personal BPDAS Brantas yang notabene adalah fasilitator perencanaan pengelolaan DAS Brantas. Peneliti menduga intensitas komunikasi itu memang mau tidak mau harus dilakukan demi suksesnya dan tercapainya target tersusunnya RPDASBT yang telah diamanahkan, hal ini terungkap dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa ada target waktu penyelesaian untuk tersusunnya Rencana Pengelolaan DAS Brantas Terpadu sebagai bagian dari percepatan kinerja kementerian dari UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)

Seberapa kuat aktor mendominasi hubungan diidentifikasi dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kekuatan Pengaruh Organisasi/Instansi

Pernyataan: Dalam perumusan rencana pengelolaan DAS Brantas terpadu seberapa kuat pengaruh organisasi/instansi Bapak/Ibu	
Jawaban	Persentase
Pendapat didengar, dirumuskan, diimplementasikan (menentukan)	50 %
Pendapat didengar, dipertimbangkan (tidak menentukan)	33,33 %
Hanya diminta pendapat (tidak berpengaruh)	16,67 %
Tidak pernah diminta pendapat (diabaikan)	0 %
Jumlah	100 %

Sumber: Data Diolah, peneliti, 2012

Dari Tabel 1 diatas tergambar bahwa separuh dari informan menyatakan jika pendapat mereka didengar, dirumuskan dan diimplementasikan. Namun hasil ini berbeda dengan kesimpulan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa instansi/ organisasi mereka hanya sekedar memberi masukan. Hal ini dikarenakan ada perbedaan tahapan dan waktu antara perumusan masalah dengan pembuatan keputusan, masukan yang ada dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kemudian dirumuskan, diseleksi dan ditentukan oleh fasilitator, mana yang menjadi kebijakan/program/kegiatan

Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa dari segi komunikasi semua berposisi sejajar, dalam proses perumusan rencana pun semua setara untuk mengemukakan

dan mempertahankan kepentingannya namun pengambilan keputusan tetap ada pada Tim Kecil atau aktor tertentu, dalam hal ini peneliti identifikasikan sebagai fasilitator penyusunan RPDASBT. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ada dominasi dalam proses perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu ini.

Batasan dari jejaring kebijakan merupakan proses hubungan saling menguntungkan dari fungsi dan struktur yang relevan. Jika melihat komposisi Tim Penyusun, jejaring ini dibatasi oleh tupoksi dan kewenangan antar aktor. Peran aktor terbatas pada apa yang menjadi wewenangnya dan apa yang diketahuinya.

Hubungan antar aktor yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu bersifat formalitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, formalitas dapat diartikan sebagai sekedar mengikuti tata cara atau basa basi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa diluar forum rapat pembahasan, tidak ada interaksi dan komunikasi dalam rangka perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu. Kalaupun ada komunikasi dan interaksi adalah dalam rangka pelaksanaan tupoksi masing masing dan sifatnya konsultatif.

Jejaring yang terbentuk dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas terpadu memang terdiri atas kumpulan aktor yang heterogen namun tidak terintegrasi. Tidak ada kohesivitas atau keeratan hubungan diantaranya, hal ini terlihat dari minimnya komunikasi diluar forum rapat pembahasan dan tiadanya inisiatif aktor yang lain untuk saling berkomunikasi dalam rangka proses penyusunan rencana pengelolaan DAS Brantas terpadu ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jejaring kebijakan dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas adalah *Bureucratic Network* tanpa integrasi dan kohesivitas aktor didalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jejaring kebijakan yang terbentuk dalam perencanaan pengelolaan DAS Brantas Terpadu didominasi oleh satu pihak dengan batasan kewenangan, tupoksi dan pengetahuan aktor lain. Satu pihak disini adalah BPDAS Brantas sebagai institusi formal yang diberi mandat untuk merealisasikan pembentukan rencana pengelolaan DAS Brantas terpadu.

Jejaring kebijakan yang terbentuk bertipa *Bureucratic Network*, dimana dominasi

perencanaan ada pada satu aktor pemerintah. Jejaring kebijakan yang terbentuk tanpa disertai dengan integrasi dan kohesivitas antar aktor didalamnya.

Saran

1. Saran Praktis

- a) Perlu adanya penyelesaian perbedaan sektoral pada tingkat Kementerian.
- b) Forum DAS Brantas sebagai wadah koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar stakeholder harus lebih aktif berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjembatani ego sektoral antar institusi.
- c) Perlu dilakukan penyusunan tata hubungan kerja yang jelas antar stakeholder.

2. Saran Akademis

- a. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang implementasi Rencana Pengelolaan DAS Brantas terpadu untuk melihat bagaimana efektifitas RPDASBT terhadap pengelolaan DAS Brantas.
- b. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengintegrasian RPDASBT dalam Renstra atau Renja SKPD yang membidangi pengelolaan daerah aliran sungai sehingga bisa diukur komitmen pelaksanaan RPDASBT dan prospek pencapaian *one watershed one plan one management*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arisandi, Prigi. 2009. *Menyelamatkan Kali Brantas*. diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2009/11/05/17341653/menyelamatkan.kali.brantas>. tanggal 20 Maret 2012.
- [2]. Bryant, C and White, LG (Terj). 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Penerjemah: Rusyanto, L.Simatupang. Jakarta: LP3ES.
- [3]. Brooks, K.N., H.M. Gregersen, A.L. Lundgren, dan R.M. Quinn. 1990. *Manual on Watershed Mangement Project Planning, Monitoring and Evaluation*. ASEAN-US Watershed Project. College, Laguna Philippines.
- [4]. Carlsson, Lars. 2000. Policy Network as Collective Action. *Policy Studies Journal*. Vol.28. No. 3. pp.502-520
- [5]. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. 2010. *Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Terpadu Propinsi Jawa Timur*.
- [6]. Dixon, J.A. dan K.W. Easter. 1986. *Integrated Watershed Management : An Approach to Resource Management*. *Water Policy and Management*, No. 10. Westview Press and London.. pp. 3-15
- [7]. Endarwati, Maria Christina. 2012. *One River, One Plan, One Management, How difficult to adopt it?*.Presentasi dalam 15th International River Symposium, Australia diakses dari http://riversymposium.com/wp-content/uploads/B4E_Maria-Endarwati.pdf.
- [8]. Howlett, dan Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. New York: Oxford University Press
- [9]. Howlett, Michael. 2002. Do Networks Matter? Linking Policy Network Structure To Policy Outcomes: Evidence From Four Canadian Policy Sectors 1990-2000. *Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique*, Vol. 35, No. 2, pp. 235-267
- [10]. Kenabatho, P.K. & M. Montshiwa. 2006. *Integrated water Resources Management As A tool For Drought Planning And Management In Botswana: A Diagnostic Approach*. *The International Journal Of Sustainable Development And Planning*. Vol. 1 No.1 p.61-75
- [11]. Miles, dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. UIP. Jakarta.
- [12]. Mylopoulos, et al. 2007. Hydrodiplomacy in Practice: Transboundary Water management in Northern Greece. *Global NEST Journal*. Vol.10 no.3 pp.287-294
- [13]. Orr, Paula, Colvin J dan King D. 2007. *Involving Stakeholders in Integrated River Basin Planning in England and Wales*. *Water Resour Manage* Vol. 21.p:331-349 akses melalui Springer
- [14]. Paimin, Pramono, I.B, Purwanto dan Indrawati, D.R. 2012. *Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR)
- [15]. Raharja, Sam'un Jaja. 2008. *Model Kolaborasi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. Disertasi. Universitas Indonesia.
- [16]. Riyadi, dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- [17]. Sandstrom, Annica and Lars Carlsson. 2008. The Performance of Policy Network: The Relation Between Network Structure and Network Performance. *The Policy Studies Journal* Vol.36 No.4 pp.497-524
- [18]. Suwitri, Sri. 2008. Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik. Delegasi, *Jurnal Ilmu Administrasi* No.3 Tahun VI.
- [19]. Warden, Frans van. 1992. Dimensions and Types of Policy Networks. *European Journal of Political Research* **21**